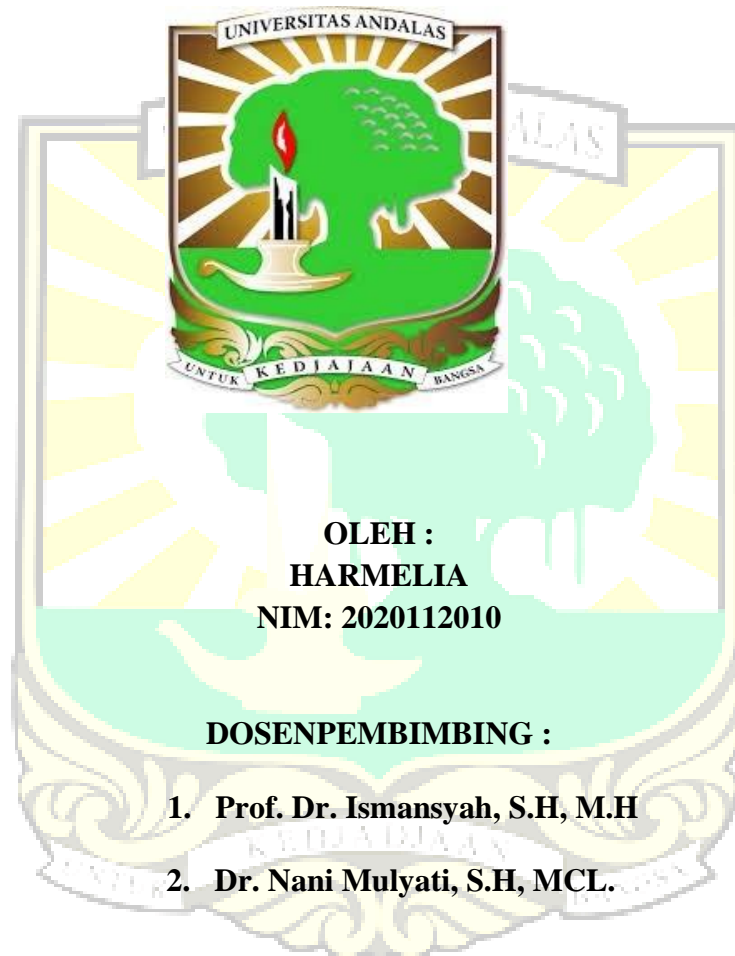


TESIS

**PENERAPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BERUPA RESTITUSI BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Padang)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas



**OLEH :
HARMELIA
NIM: 2020112010**

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H, M.H**
- 2. Dr. Nani Mulyati, S.H, MCL.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2022**

PENERAPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BERUPA RESTITUSI BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Padang)

(Harmelia, 2020112010, Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022)

ABSTRAK

Dalam hukum positif Indonesia, perdagangan orang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang tersebut merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung ataupun tidak langsung kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban adalah pemberian ganti kerugian berupa restitusi yang merupakan hak dari setiap orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Anak-anak dan perempuan seringkali menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah penerapan ganti kerugian berupa restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kota Padang? 2) Bagaimanakah kendala dalam penerapan pemberian ganti kerugian berupa restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Analisa data bersifat kualitatif. Simpulan penelitian adalah : 1) Penerapan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kota Padang tidak terlaksana dengan baik. Belum ada putusan kasus tindak pidana perdagangan orang yang memuat mengenai restitusi terhadap korbannya. 2) Kendala dalam belum optimalnya penerapan restitusi terhadap korban yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah, adanya kelemahan dari aspek yuridis dan kurangnya kepedulian aparat penegak hukum terhadap aspek perlindungan korban terutama mengenai restitusi. Saran penulis, aparat penegak hukum seharusnya lebih memperhatikan hak korban tindak pidana, khususnya mengenai hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, agar aspek perlindungan korban dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan juga mencapai aspek keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Kata Kunci : Ganti kerugian, Restitusi, Anak Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**IMPLEMENTATION OF COMPENSATION IN THE FORM OF
RESTITUTION FOR CHILDREN AS A VICTIM OF THE CRIME OF
TRAFFICKING IN PEOPLE**

(Case Study In The Jurisdiction Of The City Of Padang)

**(Harmelia, 2020112010, Master of Law Study Program, Faculty of Law,
Andalas University, 2022)**

ABSTRACK

Trafficking in persons is regulated and explained in Law Number 21 of 2007 concerning eradication of the Crime of Trafficking in Persons. This law is an effort to provide legal protecting, to victims of the crime of the trafficking in persons. One form of legal protection for victims regulates by the law is the provision of compensation in the form of restitution. Children and women wre often victims of the crime of trafficking in persons. The problem is : 1) how is the application of compensation in the form of restitution to children as a victims of criminal acts of trafficking in persons in the jurisdiction of the the city of Padang?, 2) what are the obstacles in the application of compensation in the form of restitution to children as a victims of criminal of act of trafficking in persons in the jurisdiction of the city of Padang. The study uses an empirical legal. Data collection techniques through and interview and document studies. Data analysis is qualitative. The conclusions is : 1) the application of restitution for children who are victims of criminal acts of trafficking in persons in the jurisdiction of the city of Padang has not been optimal. There has not even been a decision on the criminal act of trafficking in persons wich contains restitution for the victim. 2) the obstacle in implementing restitution for childrens as a victims of the crime of trafficking in persons is the lack of awareness of law enforcement officers on aspects of victim protection, especially regarding restitution, wich result in right in the people who are victims of criminal acts being often neglected, because they tend to be law enforcement are more focused on imposing criminal charges agains perpetrators. The author's suggestion is that law enforcement officers should pay more attention to the rights of victims of criminal acts, especially regarding restitution, so that aspects of victim protection can be carried out properly.

Keywords : Compensation, restitution, children as a victim, the crime of human trafficking.